



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215
Website : www.lbh-makassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

SIARAN PERS

Nomor : 14/SK/LBH-MKS/XI/2013

**HASIL MONITORING KOORDINASI DAN SUPERVISI KPK TERHADAP
INSTITUSI KEPOLSIAN DAN KEJAKSAAN DI SULAWESI SELATAN DAN BARAT**

Selama tahun 2011 – 2013, dalam catatan LBH Makassar setidaknya ada 33 kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat yang dikoordinasi dan disupervisi oleh KPK, dengan jumlah tersangka sedikitnya sebanyak 74 tersangka/terdakwa. Pada tahun 2011 sebanyak 6 kasus tindak pidana korupsi yang dikorsup KPK^[1] sementara pada tahun 2012 ada 22 kasus tindak pidana korupsi yang dikorsup^[2]. Pada tahun 2012, terjadi peningkatan jumlah perkara korupsi yang dikoordinasi dan disupervisi KPK, dari 6 kasus pada tahun 2011 menjadi 22 kasus pada tahun 2012. Pada tahun 2013 paling tidak ada 6 kasus yang dikordinasi dan disupervisi KPK yang belum masuk dalam kasus yang dikoordinasi dan supervisi KPK pada tahun 2011 – 2012.^[3]

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Kasus, Tersangka/Terdakwa dan Kerugian Negara

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tersangka/Terdakwa	Jumlah Kerugian Negara
2011	6	10	Rp. 5.585.710.268,-
2012	22	53	Rp. 79.262.858.844,-
2013	6	10	Rp. 73.360.000.000,- ^[4]

Selain itu KPK lebih banyak melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor keuangan daerah (APBD) dan infrastruktur. LBH Makassar mencatat sepanjang tahun 2011 – 2013, kasus tindak pidana korupsi di sektor keuangan daerah yang melibatkan pegawai negeri/penyelenggaran negara yang dikoordinasi dan disupervisi KPK sebanyak 14 kasus dengan kerugian negara sedikitnya Rp. 25.559.372.350,-. Di sektor infrastruktur yang melibatkan pegawai negeri/penyelenggara negara dan swasta (rekanan/kontraktor) sebanyak 9 kasus dengan jumlah kerugian negara sedikitnya Rp. 6.334.469.330,-. Sementara untuk sektor BUMN yang melibatkan pejabat di instansi BUMN dan swasta sebanyak 4 kasus dengan jumlah kerugian negara/potensi kerugian negara sekitar Rp. 102.539.023.000,-. Pengadaan barang 3 kasus, pengadaan barang dan perkebunan masing-masing 1 kasus. Jika dilihat bahwa penyumbang kerugian negara terbesar yakni tindak pidana korupsi yang terjadi di instansi BUMN.

Tabel 2
Kasus Berdasarkan Sektor

Tahun	2011	2012	2013	Kerugian Negara
Keuangan Daerah	4	6	4	Rp. 25.559.372.350,-
Infrastruktur	1	7	1	Rp. 6.334.469.330,-
BUMN		3	1	Rp. 102.539.023.000,-
Pengadaan barang		3		Rp. 985.000.000,-
Perkebunan	1			Rp. 700.000.000,-
Keuangan Pusat		1		Rp. 13.000.000.000,-



Tercatat pada tahun 2011 – 2013, dari 33 kasus tindak pidana korupsi, 18 yang ditangani Kejaksaan, 15 kasus yang ditangani Kepolisian.

Tabel 3
Tahapan Penanganan Kasus Korupsi di Institusi Penegak Hukum

Tahun	2011		2012		2013		Jumlah
	Jaksa	Polisi	Jaksa	Polisi	Jaksa	Polisi	
Dilimpahkan penanganannya dari KPK	2	1					3
Penyelidikan			1	2			3
Penyidikan	3		3	5	3	3	17
Dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan				4			4
Penutupan			3				3
Banding			2				2
Kasasi			2				2
Jumlah	5	1	11	11	3	3	34

Dari 33 kasus tindak pidana korupsi di Sulsel dan Sulbar yang dikorsup KPK, setidaknya ada 17 kasus tindak pidana korupsi yang berlarut larut/tidak jelas proses penanganannya (Lihat Tabel 4).

Berdasarkan hal tersebut maka kami dari LBH Makassar bersama *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi menyatakan hal sebagai berikut :

1. **Mendesak kepada Kejati Sulselbar dan Kapolda Sulselbar untuk melakukan evaluasi dan memberikan sanksi kepada penyidik di institusinya yang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang berlarut larut penanganannya;**
2. **Mendesak agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka yang terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi;**
3. **Mendesak agar penyidik di jajaran Kejaksaan dan Kepolisian agar lebih profesional, termasuk menahan tersangka dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.**

Makassar, 26 Nopember 2013

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

ACC Sulawesi

[1] Laporan Tahunan KPK tahun 2011

[2] Laporan Tahunan KPK tahun 2012

[3] Sumber diolah dari beberapa pemberitaan di media cetak

[4] Kerugian negara diluar Kasus Bansos Pemprov 2008